

# LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH**



**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Laporan Akuntabilitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026. LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh stakeholder mengenai pencapaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan memberikan info kinerja terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja mencakup:

- 1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan, dan
- 2) tingkat pencapaian sasaran unit kerja yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Misi nomor 3 dan 6 yang telah dijabarkan ke dalam Renstra dan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam berbagai Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, juga dapat memberikan gambaran mengenai faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan.

LKjIP yang kami susun masih jauh dari sempurna, kami membuka diri untuk menerima masukan, saran serta kritik yang positif dalam rangka untuk perbaikan/ penyempurnaan.

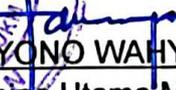
Kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam LKjIP ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, dan dapat bermanfaat untuk menjadi suatu informasi yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Kebumen, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN



  
HARYONO WAHYUDI, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 196701261986071001

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Fungsi Strategis	8
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.1.1 Rencana Strategis (Resntra)	10
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKUI)	11
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	12
2.2. Perjanjian Kinerja	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Realisasi Anggaran	47
BAB IV. PENUTUP	54
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	54
4.2. Permasalahan/Kendala	56
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja	57
LAMPIRAN – LAMPIRAN	60
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan realisasi Belanja	
3. Prestasi yang telah dicapai tingkat Provinsi atau Nasional	

# DAFTAR TABEL

	HALAMAN	
Tabel 1.1.	Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024	6
Tabel 1.2.	Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Pendidikan Tahun 2024	6
Tabel 1.3.	Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Jabatan Tahun 2024	6
Tabel 1.4.	Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 1.5.	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU Daerah) Kabupaten Kebumen	
Tabel 2.1.	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU Daerah) Kabupaten Kebumen	11
Tabel 2.2.	Tabel Target indikator Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 2.3.	Tabel Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024	14
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	19
Tabel 2.5.	Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran Tahun 2024.	20
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peningkatan Kinerja	24
Tabel 3.2.	Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024	25
Tabel 3.3.	Perkembangan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan tahun 2021-2024	27
Tabel 3.4.	Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026	29
Tabel 3.5.	Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi	30
Tabel 3.6.	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	31
Tabel 3.7.	Analisa Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	33
Tabel 3.8.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	47
Tabel 3.9.	Tabel Range Capaian Kegiatan Tahun 2024	49
Tabel 3.10.	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Penginapan/Pesanggrahan/Villa	50
Tabel 3.11.	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD DBHCHT di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	51
Tabel 3.12.	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Tugas Pembantuan di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024	52

## DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen	4

## DAFTAR GRAFIK

	HALAMAN
Grafik 3.1 Presentase Koperasi Sehat	36
Grafik 3.2 Presentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas	39
Grafik 3.3 Presentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	42
Grafik 3.4 Presentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik merupakan landasan utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ini diperlukan karena aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan yang dapat diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil yang sebesar mungkin.

Sejarah berdirinya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

#### **1.1.1. Periode DINAS PENGELOLAAN PASAR (1997- 2004)**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen No 10 Tahun 1997 tanggal 27 November 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen lebih di kenal Dinas Pengelolaan Pasar yang merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar.

#### **1.1.2. Periode DISPERINDAGKOP (2004 - 2016)**

Pada tahun 2004 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang secara khusus menetapkan pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sejak tanggal 1 Juli 2004 menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen dan lembar Daerah Kabupaten Kebumen No 33 Tahun 2004 Seri D Nomor 6.

#### **1.1.3. Periode DISPERINDAG (2017 - 2021)**

Pada akhir tahun 2016, perubahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebabkan perubahan struktur organisasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah pada ketentuan Pasal 21, Pasal 22 tentang tugas Bidang Pengembangan Perdagangan dan pasal 24 tentang tugas Seksi Pengawasan Perdagangan dan Distribusi Barang. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.

#### 1.1.4. Periode DISPERINDAGKUKM (2021 sampai dengan sekarang)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Dinas Perindustrian, Perdagangan menyatu dengan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sehingga merger menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 maka menjalankan seluruh aktivitasnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi :

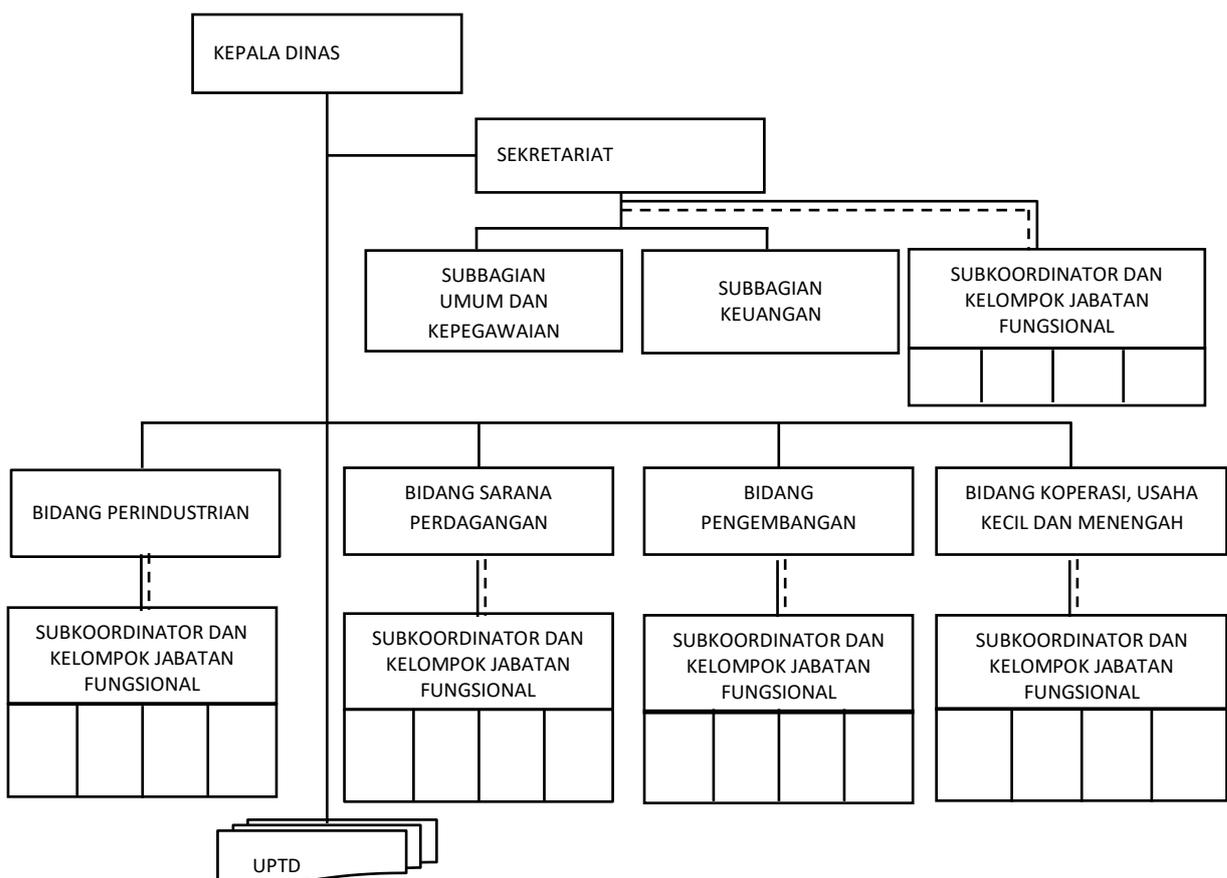
- a. penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Pasar dan UPTD Metrologi Legal pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Pasal 4 telah disusun organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, diubah dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 4 tipe A menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan, serta bidang koperasi usaha kecil dan menengah.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, tertuang pada peraturan tersebut diatas dan bagan organisasi tergambar pada bagan sebagaimana tertuang pada gambar 1.1.

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen**



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 119 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menunjang kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen diperlukan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub bagian Keuangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perindustrian
  - a. Sub koordinator Pengelolaan Informasi Industri
  - b. Sub koordinator Pembangunan Industri
  - c. Sub koordinator Pengendalian Industri
4. Bidang Sarana Perdagangan
  - a. Sub koordinator Pengelolaan Sarana Perdagangan;
  - b. Sub koordinator Pengembangan Sarana Perdagangan;
  - c. Sub koordinator Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan.
5. Bidang Pengembangan Perdagangan
  - a. Sub koordinator Bina Usaha Perdagangan;
  - b. Sub koordinator Promosi dan Informasi Perdagangan;
  - c. Sub koordinator Pengawasan Perdagangan
6. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - a. Sub koordinator Koperasi;
  - b. Sub koordinator Usaha Kecil dan Menengah;
  - c. Sub koordinator Kelembagaan dan Informasi.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
  - a. UPTD Pasar I;
  - b. UPTD Pasar II;
  - c. UPTD Pasar III;
  - d. UPTD Pasar IV;
  - e. UPTD Metrologi Legal Kebumen.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024**

Status Pegawai	Golongan																Kelas	Non Kelas	Jumlah	
	I				II				III				IV							VII
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E			
CPNS																				0
PNS				1	3	3	14	5	31	6	4	8	5	0	1	0	0			81
P3K																		4		4
P2K																			173	173
JUMLAH				1	3	3	14	5	31	6	4	8	5	0	1	0	0	4	178	258

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

**Tabel 1. 2 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Pendidikan Tahun 2024**

NO	URAIAN	SD			SMP			SLTA			D3			S1			S2			JUMLAH
		PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	NON PNS	PNS	P3K	NON PNS	
1	Kepala Dinas	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	1		-	1
2	Sekretariat Dinas	-		-	-		-	8		3	-		-	4		-	1		-	16
3	Bidang Perindustrian	-		-	-		-	1		-	1		-	1		3	2		-	8
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	-		-	-		-	1		3	-		2	3		4	-		-	13
5	Bidang Sarana Perdagangan	-		1	-		-	-		6	-		3	2		7	2		-	21
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-		-	-		-	1		5	-		-	2	1	10	1		-	20
7	UPTD Pasar I	-		1	5		3	6		18	1		-	1		-	-		-	35
8	UPTD Pasar II	2		-	3		5	4		33	-		2	1		2	-		-	52
9	UPTD Pasar III	-		-	5		3	4		19	-		1	2		1	-		-	35
10	UPTD Pasar IV	1		1	3		1	8		14	-		-	1		-	-		-	29
11	UPTD Metrologi Legal	-		-	-		-	-		2	1	3	-	2		-	-		-	8
12	UPTD Pengelola Kawasan Alun-Alun	-		-	-		-	-		19	-		1	-		-	-		-	20
	JUMLAH	3	0	3	16	0	12	33	0	122	3	3	9	19	1	27	7	0	0	258

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

**Tabel 1. 3 Data Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Jabatan Tahun 2024**

NO	URAIAN	ESELON			JFT	JFU	P3K	NON PNS	JUMLAH
		II	III	IV					
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-		0	1
2	Sekretariat Dinas		1	2	-	10		4	17
3	Bidang Perindustrian	-	1	-	3	1		3	8
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	-	1	-	1	2		9	13
5	Bidang Sarana Perdagangan	-	1	-	2	1		17	21
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	1	-	1	2	1	15	20
7	UPTD Pasar I	-	-	1	-	12		21	35
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	1	-	1	2	1	15	20
7	UPTD Pasar I	-	-	1	-	12		21	35
8	UPTD Pasar II	-	-	1	-	9		42	52
9	UPTD Pasar III	-	-	1	-	10		24	35
10	UPTD Pasar IV	-	-	1	-	12		16	29
11	UPTD Metrologi Legal	-	-	2	1	0	3	2	8
12	UPTD Pengelola Kawasan Alun-Alun	-	-	-	-	0		20	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>59</b>		<b>173</b>	<b>258</b>

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

**Tabel 1.4 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Kelamin**

NO	URAIAN	PNS		P3K		NON PNS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	6	7			3		16
3	Bidang Perindustrian	1	4			2	1	8
4	Bidang Pengembangan Perdagangan	1	3			6	2	12
5	Bidang Sarana Perdagangan	3	1			14	3	21
6	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	3	1	1		11	4	20
7	UPTD Pasar I	12	1			21	1	35
8	UPTD Pasar II	9	1			36	6	52
9	UPTD Pasar III	10	1			20	4	35
10	UPTD Pasar IV	13	0			15	1	29
11	UPTD Metrologi Legal	2	1	2	1	3	0	9
12	UPTD Pengelola Kawasan Alun-Alun					16	4	20

JUMLAH	61	20	3	1	147	26	258
PROSENTASE	23,64	7,75	1,16	0,39	56,98	10,08	100,00

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

## 1.2. Fungsi Strategis

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

1. Penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
2. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah
6. Pelaksanaan administrasi Dinas
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

## 1.3. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen Nomor 700/IP.RB/16/4/2024 Tanggal 28 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melakukan penyesuaian penetapan Indikator Tujuan pada RENSTRA, IKU dengan peraturan Bupati Kebumen tentang IKU. Tujuan dan sasaran RENSTRA beserta indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, sebagaimana penyesuaian yang sudah kami lakukan pada tabel berikut :

**Tabel 1.5 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU Daerah) Kabupaten Kebumen**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatkan PDRB Sektor Sekunder	Persentase koperasi sehat	%	26,67	33,33	40	46,67	53,33	63,33
			Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	8,75	10,27	10,89	11,76	12,31	13,22
			Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	%	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93
		Meningkatkan PDRB Sektor Tersier	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	%	10,30	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha di daerah. Beberapa permasalahan utama yang perlu segera diatasi meliputi : kurangnya Infrastruktur pendukung, daya saing produk lokal yang rendah, serta akses pasar dan pemasaran yang terbatas. Hal ini menghambat produktivitas dan perluasan usaha, terutama bagi UMKM dan industri kecil. Produk lokal, seperti emping, gula semut, dan kerajinan bambu, masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas, inovasi, dan standarisasi.

Pelaku usaha di Kebumen masih mengalami kesulitan dalam memperluas pasar, baik offline maupun digital. Keterbatasan infrastruktur industri, seperti pusat inovasi, laboratorium pengujian kualitas, dan pusat pelatihan usaha, menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Keterbatasan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha menjadi hambatan dalam peningkatan keterampilan, adopsi teknologi, serta inovasi produk yang lebih bernilai tambah.

Selain itu, banyaknya koperasi yang tidak aktif menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Koperasi yang seharusnya menjadi pilar perekonomian rakyat justru tidak berfungsi optimal akibat manajemen yang tidak profesional dan kurangnya pembinaan dari pemerintah. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan upaya terintegrasi seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, pengenalan pemasaran digital, dukungan teknologi, dan revitalisasi koperasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2. 1. Rencana Strategis (Renstra)**

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Kebumen dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan. Renstra secara sistematis memprioritaskan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

##### **2.1.1. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Kabupaten Kebumen tahun 2021–2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**.

Dari Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mendukung Misi Kepala Daerah periode 2021-2026, misi yang ke 3 (tiga) yaitu : **“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”**

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen fokus pada tiga hal, yaitu (1) Perbaikan tata kelola (*Governance*), (2) Perbaikan pengelolaan risiko (*Risk*), dan (3) Perbaikan pengendalian intern (*Control*). Untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dirumuskan secara sistematis program-program yang akan dilaksanakan.

### 2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melakukan penyesuaian penetapan Indikator Kinerja Utama pada RENSTRA. Tujuan dan sasaran RENSTRA beserta indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU Daerah) Kabupaten Kebumen**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatkan PDRB Sektor Sekunder	Persentase koperasi sehat	%	26,67	33,33	40	46,67	53,33	63,33
			Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	%	8,75	10,27	10,89	11,76	12,31	13,22
			Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	%	8,31	6,15	5,79	5,47	5,19	4,93
		Meningkatkan PDRB Sektor Tersier	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	%	10,30	5,42	5,14	4,89	4,66	4,45

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

### **2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja. Rencana Kinerja Tahunan 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan. Target sasaran untuk Tahun 2024 merupakan target tahun Keempat dari Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Tabel Target indikator Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Capaian Tahun 2024
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	4.830,22
			Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB Sektor Tersier	Miliar Rupiah	12.994,28

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil maka perlu dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang telah disusun, diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan mengalokasikan sumber daya organisasi.

Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Tabel Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	270,000,000	20.000.000	
					Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			16.072.000
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	213,978,000	277.287.000	166.797.000
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	277,834,000	445.730.000	
					Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			936.543.000
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan	4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	4	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	164,139,000	30.000.000	
				5	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	224,956,000	40.000.000	68.505.000

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Usaha Mikro (UMKM)		Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	624,200,000	1.766.560.000	43.195.000	
5	Program Pengembangan UMKM	5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	7	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1,746,122,000	2.058.007.000		
					Pengembangan Usaha Mikro			3.950.334.000	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	33.554.000	42.787.000	
				9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	15.000.000	15.000.000	
		7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,810,198,000	9.836.916.850	10.030.922.000	
				11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127,730,000	97.108.000	107.370.000	
		8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105,000,000	35.000.000		
				13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75,000,000	0		
		9	Administrasi Umum Perangkat Daerah		14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000	12.600.000	10.000.000
					15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,000,000	20.000.000	75.510.000
					16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205,407,000	80.000.000	50.000.000
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5,000,000	0	3.500.000		
				18	Penyediaan Bahan/Material	63,008,000	15.000.000	15.000.000	

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	
				19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,824,000	48.000.000	48.000.000
				20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15,000,000	4.000.000	4.000.000
		10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Pengadaan Mebel	0	0	
				22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.000.000	31.439.000
				23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	0	
		11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,995,000	3.000.000	2.000.000
				25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514,000,000	623.395.000	536.253.000
				26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73,496,000	16.000.000	15,000,000
				27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20,000,000	8.000.000	46,325,000
		12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,000,000	142.708.000	200,000,000
				29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	40.000.000	40,000,000
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,665,000,000	16.172.707.000	12,057,239,670
				31	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,879,602,000	2.204.700.000	2,677,565,000

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	
		14	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	750,000,000	599.432.000	807,273,000
				33	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	350,000,000	356.857.000	553,707,000
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	15	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	34	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	250,000,000	114.544.000	88,256,000
		16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	35	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	623,408,000	103.683.000	78,506,000
9	Program Pengembangan Ekspor	17	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	250,000,000	325.366.000	
					Misi Dagang bagi Produksi Ekspor Unggulan			88,108,000
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	18	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	37	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	350,000,000	173.754.000	163,543,000
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	19	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	38	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	300,000,000	639.474.000	
					Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			1,031,470,000

No	Program		Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	20	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	39	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	75,000,000	55.500.000	94,540,000
				40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	17,261,000	137.000.000	119,274,000
				41	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100,000,000	96.000.000	94,640,000
				42	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	684,739,000	830.000.000	970,000,000
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	21	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	250,000,000	80.366.000	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota			86,156,000
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	22	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	44	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100,000,000	43.554.000	36,116,000

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja sebagai pengukuran kinerja perangkat daerah membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Disperindagkukm sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah							
	Sasaran :							
1	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Sektor Sekunder	Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	5,47				5,47
2		Prosentase Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Sehat	%	46,67				46,67
3		Prosentase Meningkatnya UMKM yang Berkualitas	%	11,76				11,76
4	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Sektor Tersier	Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	4,89				4,89

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen melaksanakan 14 program dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja operasi sebesar Rp. 24.658.726.170,00;
2. Belanja modal sebesar Rp. 10.742.219.500,00

Untuk mendukung tercapainya target perjanjian kinerja tahun 2024, dilaksanakan 14 program dan 22 kegiatan dengan pagu anggaran sebagaimana tabel 2.5. berikut ini.

**Tabel 2.5 Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran Tahun 2024.**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
A	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	46,67	16.072.000
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi akuntabel	Koperasi	90	16.072.000
B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	Persen	29,9	166.797.000
2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian yang diselenggarakan	Kegiatan	3	166.797.000
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	Presen	6	936.543.000
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Unit usaha	24	936.543.000
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	Prosen	11,76	111.700.000
4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang terbina	Unit usaha	384	111.700.000
E	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan	Unit usaha	45	3.950.334.000
5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	Unit usaha	300	3.950.334.000
F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosen	100	11.273.106.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	16	57.787.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	10.138.292.000
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	Kegiatan	0	
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	206.010.000
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	3	31.439.000
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	599.578.000
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Unit	8	240.000.000
G	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	Rupiah	8064	16.095.784.670
13	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	UPTD	8	14.734.804.670
14	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	8	1.360.980.000
H	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	Prosen	1,5	166.762.000
15	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Kali	381	88.256.000
16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Hari	365	78.506.000
I	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	Rupiah	2100	88.108.000
17	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	Kegiatan	3	88.108.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	TARGET	PAGU ANGGARAN
	Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
J	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang Tertera	Prosen	63,79	163.543.000
18	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	unit	3290	163.543.000
K	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	Prosen	71,77	1.031.470.000
19	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	UMKM	6	1.031.470.000
L	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	Prosen	20,43	1.278.454.000
20	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang terbina	Dokumen	100	1.278.454.000
M	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Dokumen Perizinan yang Terfasilitasi	Prosen	100	86.156.000
21	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan industri yang terfasilitasi	Dokumen	45	86.156.000
N	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1	36.116.000
22	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Industri	Dokumen	1	36.116.000
	JUMLAH				35.400.945.670

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penggunaan anggaran yang melaporkan progres mengenai pencapaian kinerja dan evaluasi serta analisa terhadap pengukuran kinerja.

1. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran menggunakan rumus pengukuran kinerja sebagai berikut :
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

3. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peningkatan Kinerja**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Permenpan RB RI No.53 Tahun 2014

Pengukuran kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan menetapkan penetapan indikator kinerja, penentuan capaian kinerja. Kemudian dievaluasi dan dianalisis akuntabilitas kerjanya, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dan langkah-langkah efisiensi yang telah dilaksanakan.

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibiayai baik dari APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen maupun APBN.

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam upaya pencapaian kinerja indikator sasaran yang diampu. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Indikator Kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya koperasi yang sehat
2. Meningkatnya Usaha Kecil Menengah yang berkualitas
3. Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian
4. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

### 3.1.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 adalah membandingkan antara target dan realisasi tahun berkenaan. Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tabel berikut

**Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatkan PDRB Sektor Sekunder	Persentase Koperasi yang sehat	46,67	77,36	165,76	Sangat Baik
2			Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	11,76	11,82	100,51	Sangat Baik
3			Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	5,47	12,00	219,38	Sangat Baik
4		Meningkatkan PDRB Sektor Tersier	Persentase Peningkatan PDRB sektor Perdagangan	4,89	9,21	188,34	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian			17,20	27,60	168,50	Sangat Baik

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024 telah mencapai keberhasilan, berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dari setiap indikator secara umum menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat baik. Capaian kinerja Tahun 2024

sebesar 168,50% tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada target dan progres yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Rata-rata Realisasi kinerja tahun 2024 lebih tinggi 10,40 dari rata rata target 17,20 dengan realisasi kinerja yaitu sebesar 27,60.

### 3.1.2. Pengukuran Kinerja 2021-2024

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3. 3 Perkembangan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan tahun 2021-2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
				T	R	C	K	T	R	C	K	T	R	C	K	T	R	C	K
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatkan PDRB ADHB sektor sekunder	Persentase Koperasi sehat	26,67	26,67	100	Baik	33,33	36,67	110,02	Sangat Baik	40	83,33	208,33	Sangat Baik	46,67	77,36	165,76	Sangat Baik
2			Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	8,75	8,91	101,82	Sangat Baik	10,27	10,41	101,36	Sangat Baik	10,89	11,11	102,02	Sangat Baik	11,76	11,82	100,51	Sangat Baik
3			Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	8,31	5,76	69,31	Cukup	6,15	12,73	206,99	Kurang	5,79	12,00	207,25	Sangat Baik	5,47	12,00	219,38	Sangat Baik
4		Meningkatkan PDRB ADHB sektor tersier	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	10,30	7,93	76,99	Cukup	5,42	7,09	130,81	Sangat Baik	5,14	9,21	179,18	Sangat Baik	4,89	9,21	188,34	Sangat Baik
<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>87,03</b>	<b>Baik</b>			<b>134,79</b>	<b>Baik</b>			<b>174,19</b>	<b>Sangat Baik</b>			<b>168,50</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

Keterangan : T=Target R=Realisasi C=Capaian dalam % K=Kategori

Berdasarkan Tabel 3.3, perkembangan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama 2021–2024 menunjukkan progresivitas yang signifikan. Pada indikator Persentase Koperasi Sehat, capaian konsisten di atas target dengan puncak tertinggi pada 2023 (83,33%) dan tetap stabil di 2024 (77,36%), didorong oleh program pendampingan dan pengawasan berbasis kebutuhan koperasi. Sementara itu, Persentase UKM Berkualitas mengalami kenaikan secara stabil di 2024 (11,82% dari target 11,76%), mencerminkan keberhasilan integrasi pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan digitalisasi UMKM. Pada sektor industri, Peningkatan PDRB Perindustrian yang sempat terkendala di 2021 (69,31%) berhasil pulih dengan capaian di atas 200% pada 2023–2024, didukung revitalisasi industri kecil melalui teknologi dan investasi. Di sektor perdagangan, Peningkatan PDRB Perdagangan konsisten melampaui target sejak 2022 (130,81%) hingga 2024 (188,34%), berkat optimalisasi distribusi, stabilisasi harga, dan ekspansi pasar digital. Meski demikian, perlu mitigasi risiko penurunan capaian koperasi pada 2024 serta evaluasi anomali kategori kinerja sektor industri di 2022. Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja 2024 mencapai 184,70%, menegaskan efektivitas sinergi program, kolaborasi multipihak, dan adaptasi kebijakan yang responsif, meski tetap memerlukan penguatan sistem pemantauan dan alokasi anggaran berbasis outcome untuk menjawab kompleksitas tantangan ke depan.

### **3.1.3. Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026**

Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	Target sampai akhir tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 (5/6*100)
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatkan PDRB ADHB sektor sekunder	Persentase Koperasi sehat	77,36	63,33	122,15
2			Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	11,82	13,22	89,40
3			Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	12,00	4,93	127,99
4		Meningkatkan PDRB ADHB sektor tersier	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	9,21	4,45	129,21

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

Berdasarkan Tabel 3.4 yang berjudul "Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2026", analisis capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menunjukkan dinamika yang signifikan dalam upaya mencapai target jangka menengah.

Pada indikator Persentase Koperasi Sehat, capaian tahun 2024 sebesar 77,36% melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 63,33%, dengan tingkat kemajuan mencapai 122,15%. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan dan pembinaan koperasi yang berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi.

Selanjutnya, untuk Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkualitas, realisasi tahun 2024 mencapai 11,82%. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan, termasuk pelatihan dan akses pasar yang lebih baik, sehingga mendorong kualitas usaha kecil dan menengah di daerah.

Pada indikator Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perindustrian, capaian tahun 2024 sebesar 12,00% juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, melebihi target jangka menengah 2026 yang ditetapkan sebesar 4,93%, dengan tingkat kemajuan mencapai 127,99%. Ini menandakan adanya pertumbuhan yang kuat dalam sektor industri, didorong oleh inovasi dan peningkatan efisiensi produksi.

Terakhir, untuk Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan, realisasi tahun 2024 sebesar 9,21% juga melampaui target 2026 yang hanya 4,45%, dengan tingkat kemajuan 129,21%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan strategi pemasaran dan distribusi yang telah diterapkan, serta adaptasi terhadap perubahan pasar yang dinamis.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah tahun 2026 menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada hampir semua indikator kinerja. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara program-program yang dijalankan, dukungan kebijakan yang tepat, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Namun, tantangan tetap ada, dan perlu adanya strategi berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini dalam menghadapi dinamika ekonomi yang akan datang.

### 3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Provinsi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kerja	Capaian 2024	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Persentase Koperasi sehat	77,36%	-	-
		Persentase Usaha Kecil yang berkualitas	11,82%	-	-
		Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	12,00%	33,52%	35,79%
		Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	9,21%	13,41%	68,68%

Sumber : Olah Data DisperindagKUKM 2024

PDRB ADHB merupakan nilai total produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB ADHB Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu 12,00% masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu sebesar 33,52%. Pada indikator PDRB ADHB sektor Perdagangan capaian Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu 9,21% masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu sebesar 13,41%.

### 3.1.5. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024

**Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi					
1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor sekunder					
1.1.1		Persentase Koperasi sehat	46,67	77,36	165,76	Koperasi mendapatkan layanan konsultasi dan pembinaan dalam menjalankan kegiatan perkoperasian.	Meningkatkan layanan konsultasi dan pembinaan kepada koperasi.
1.1.2		Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	11,76	11,82	100,51	Masyarakat mendapatkan pelayanan perijinan usaha yang terintegasi dan fasilitas Pendidikan serta pelatihan wirausaha.	Pemerataan jangkauan layanan perijinan dan pemberian pendidikan serta pelatihan kewirausahaan.
1.1.3		Persentase Peningkatan PDRB sektor Perindustrian	5,47	12	219,38	Industri Kecil Menengah mendapatkan layanan perijinan, pendampingan dan pembinaan dalam menjalankan kegiatan industri.	Meningkatkan layanan perijinan, pendampingan, dan pembinaan kepada Industri Kecil Menengah.
1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier					
1.2.1		Persentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	4,89	9,21	188,34	Pedagang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.	Pemerataan jangkauan pendampingan dan pembinaan pedagang dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>			<b>17,20</b>	<b>27,60</b>	<b>168,50</b>		

### 3.1.6. Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

Berdasarkan perhitungan efisiensi capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebesar 94,21%, dengan rumusan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - \text{RAKi})}{\sum_{i=1}^n (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = \frac{((\text{Pagu Anggaran Keluaran } i \times \text{Capaian Keluaran } i) - \text{Realisasi Anggaran Keluaran } i)}{(\text{Pagu Anggaran Keluaran } i \times \text{Capaian Keluaran } i)} \times 100\%$$

PAKi = Pagu Anggaran Keluaran i

CKi = Capaian Keluaran i

RAKi = Realisasi Anggaran keluaran i

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut ini.

**Tabel 3.11 Analisa Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pembilang (Efisiensi)	Penyebut (Efisiensi)	Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6	9=(6*5)-7	10=6*5	11=(9/10)*100
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				168,50	35.400.945.670	33.351.783.134	94,21	26.297.796.479,55	59.649.579.613,55	44,09
Meningkatkan PDRB ADHB sektor sekunder	Persentase Koperasi Sehat	46,67	77,36	165,76	1.119.412.000	1.099.799.885	98,25	755.696.636,14	1.855.496.521,14	40,73
	Persentase Usaha Kecil Menengah yang berkualitas	11,76	11,82	100,51	4.062.034.000	4.009.735.338	98,71	73.023.325,27	4.082.758.663,27	1,79
	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perindustrian	5,47	12,00	219,38	1.400.726.000	1.391.228.384	99,32	1.681.662.292,42	3.072.890.676,42	54,73
Meningkatkan PDRB ADHB sektor tersier	Persentase Peningkatan PDRB ADHB sektor Perdagangan	4,89	9,21	188,34	28.818.773.670	26.851.019.527	93,17	27.427.284.256,37	54.278.303.783,37	50,53

Sumber data : DisperindagKUKM

Berdasarkan Tabel 3.11 yang menyajikan Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa terdapat kinerja yang signifikan dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian program.

Pertama, dari segi efisiensi, rata-rata efisiensi penggunaan anggaran mencapai 44,09%, yang menunjukkan adanya penghematan dalam alokasi dana tanpa mengorbankan kualitas output. Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang optimal, di mana program-program unggulan seperti Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Pengendalian Izin Usaha Industri masing-masing mencatat efisiensi sebesar 99,97% dan 99,53%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk kedua program tersebut sangat mendekati pagu yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi, terutama pada Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, yang hanya merealisasikan 88,44% dari anggaran yang dialokasikan. Keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu dievaluasi untuk meningkatkan penyerapan anggaran di masa mendatang.

Kedua, dari perspektif efektivitas, rata-rata pencapaian kinerja mencapai 168,50%, yang menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang ditetapkan. Program Koperasi Sehat berhasil mencapai 165,76% dari target, sedangkan PDRB Sektor Perindustrian mencatat pencapaian luar biasa sebesar 219,38%. Pencapaian ini didorong oleh berbagai inisiatif, termasuk pendampingan intensif dan revitalisasi industri kecil berbasis teknologi. Di sisi lain, PDRB Sektor Perdagangan juga menunjukkan kinerja yang baik dengan pencapaian 188,34%, berkat strategi stabilisasi harga dan perluasan jaringan distribusi.

Namun, analisis ini juga mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam alokasi anggaran dan dampak yang dihasilkan. Program-program dengan anggaran tinggi, seperti Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, perlu lebih dioptimalkan untuk memastikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, tantangan operasional seperti keterlambatan distribusi logistik dan ketidakteraturan dalam rantai pasok juga perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

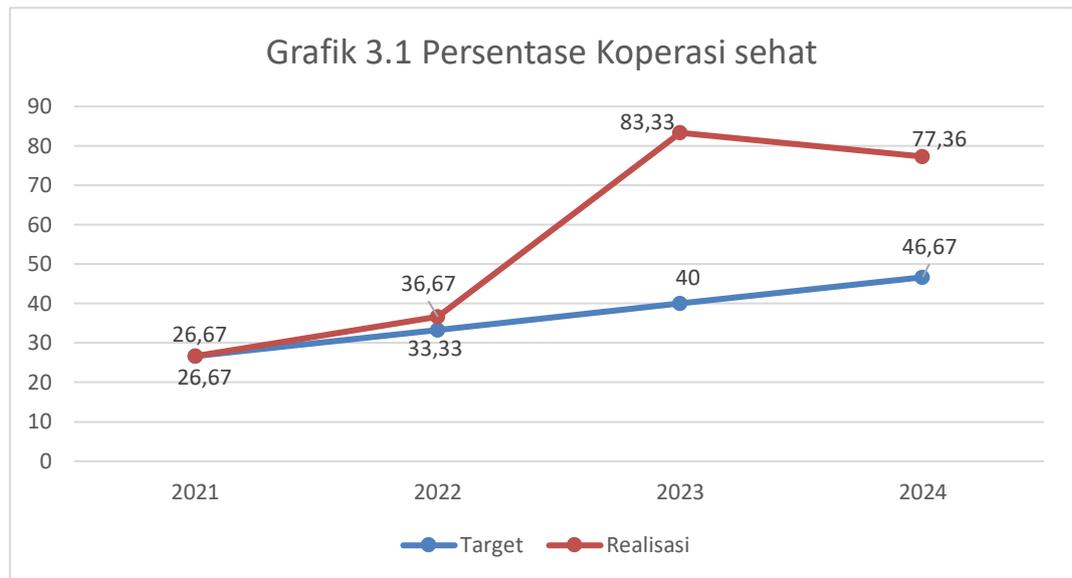
Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan. Pertama, perlu dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran dengan mempercepat proses perencanaan dan pengadaan, terutama untuk program-program dengan realisasi rendah. Kedua, penguatan sistem monitoring berbasis outcome harus diintegrasikan untuk memastikan bahwa setiap program tidak hanya mencapai target kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat. Ketiga, kolaborasi antarprogram perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik, terutama antara Program Pengembangan UMKM dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Terakhir, inovasi dalam pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan harus dipertimbangkan untuk mendukung program-program strategis.

Secara keseluruhan, Disperindagkukm Kabupaten Kebumen telah menunjukkan kinerja yang efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya pada tahun 2024. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pencapaian ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil, guna memperkuat kontribusi sektor industri, perdagangan, dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

### **3.1.7. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Program dan Kegiatan Pencapaian Kinerja**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melakukan analisa atas keberhasilan dan kegagalan program serta pencapaian Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Meningkatnya Kegiatan Koperasi Sehat



Berdasarkan Grafik 3.1 Persentase Koperasi Sehat Tahun 2021–2024, capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menunjukkan tren positif dengan realisasi 77,36% pada 2024, melampaui target sebesar 46,67% (capaian 165,76%). Namun terjadi penurunan capaian dibandingkan tahun 2023 (83,33%), yang mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam untuk mempertahankan momentum keberhasilan. Keberhasilan pencapaian target kinerja Koperasi Sehat pada tahun 2024 atas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam melakukan pendampingan dan pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi dengan aspek yang dinilai sebagai berikut :

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan pertumbuhan
- g. Jatidiri koperasi.

1) Faktor Keberhasilan

Program Pendampingan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan

Keberhasilan ditopang oleh program pendampingan intensif bagi pengurus dan pengawas koperasi, dengan fokus pada aspek:

- Permodalan: Optimalisasi struktur modal dan akses pembiayaan.
  - Manajemen: Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi dan operasional.
  - Likuiditas dan Kemandirian: Penguatan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
  - Identitas Koperasi: Sosialisasi nilai-nilai koperasi untuk memperkuat partisipasi anggota.
- a. Kesesuaian dengan Misi Pembangunan Daerah  
Program selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kebumen 2021–2026, yakni pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penggunaan Indikator Kinerja Terukur  
Penilaian kesehatan koperasi menggunakan parameter komprehensif seperti kualitas aset produktif, efisiensi manajemen, dan pertumbuhan keanggotaan, yang tercermin dalam Perjanjian Kinerja 2024.
- 2) Tantangan/Kegagalan  
Penurunan Capaian 2024 Dibandingkan 2023  
Meski melampaui target, capaian 2024 (77,36%) lebih rendah daripada 2023 (83,33%). Hal ini disebabkan oleh:
- Keterbatasan Partisipasi Anggota: Minimnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan.
  - Manajemen Keuangan yang Belum Optimal: Masih ditemukan ketidakdisiplinan dalam pencatatan keuangan dan alokasi SHU.
  - Diversifikasi Usaha Terbatas: Sebagian koperasi masih bergantung pada satu jenis usaha, rentan terhadap fluktuasi pasar.
  - Tingkat Literasi Keuangan yang Rendah  
Minimnya pemahaman pengurus dan anggota tentang prinsip-prinsip perkoperasian, termasuk tata kelola risiko dan inovasi produk.

### 3) Rekomendasi Solusi

#### a. Penguatan Kapasitas SDM Koperasi

- Pelatihan Manajemen Keuangan: Implementasi sistem akuntansi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi.
- Sekolah Koperasi: Pembentukan pusat pelatihan khusus yang menyoar pengurus dan anggota koperasi.

#### b. Diversifikasi Usaha dan Inovasi Produk

- Pengembangan Klaster Usaha: Membangun sinergi antar-koperasi dalam pengolahan produk unggulan lokal (misal: emping, gula semut).
- Integrasi Teknologi Digital: Memanfaatkan platform e-commerce untuk perluasan pasar.

#### c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

- Pelaporan Keuangan Berkala: Wajibkan koperasi menyusun laporan keuangan triwulanan yang diverifikasi oleh pihak independen.
- Sistem Penilaian Kesehatan Koperasi (SP3K): Penguatan sistem pemantauan berbasis data real-time untuk deteksi dini masalah.

#### d. D . Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan

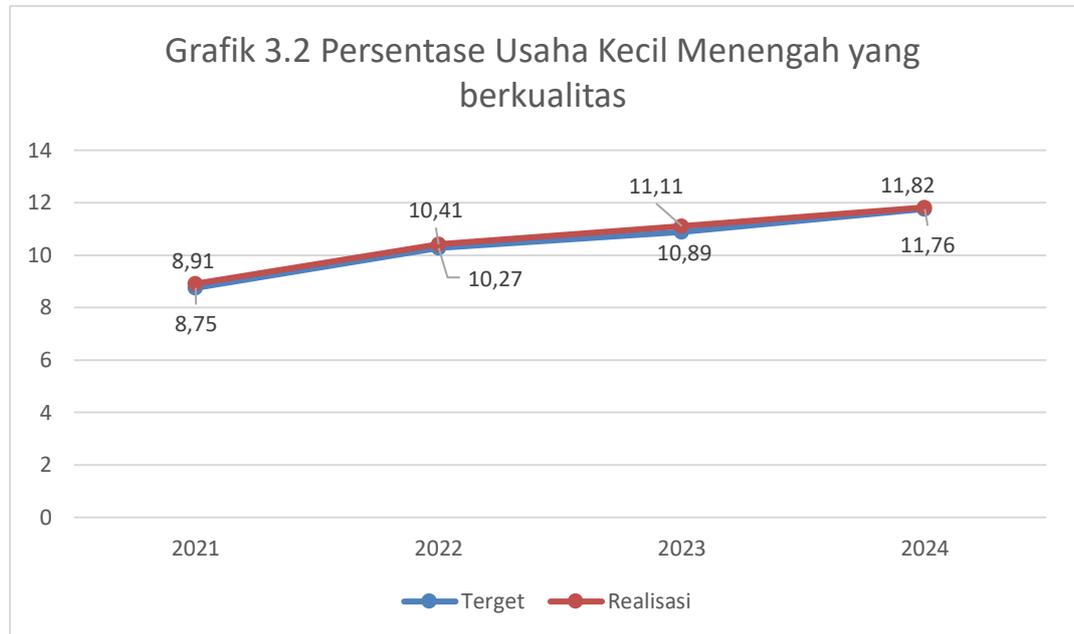
- Akses Pembiayaan Inklusif: Fasilitasi kerja sama dengan perbankan/BPR untuk penyaluran KUR dengan bunga kompetitif.
- Pendampingan Hukum: Bantuan hukum dalam penyusunan AD/ART dan penyelesaian sengketa internal.

### 4) Kesimpulan

Keberhasilan peningkatan kesehatan koperasi di Kabupaten Kebumen merupakan hasil dari pendekatan holistik yang memadukan pembinaan teknis, keselarasan dengan kebijakan daerah, dan komitmen terhadap prinsip transparansi. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan sustainability program melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan jaringan pasar. Dengan langkah-langkah

strategis ini, diharapkan koperasi dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

## 2. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Meningkatnya Kegiatan UMKM Berkualitas



Berdasarkan Grafik 3.2 Persentase Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Berkualitas, terlihat bahwa capaian kinerja UKM di Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai 11,82%, melampaui target sebesar 11,76%. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas UKM, meskipun perlu dicermati adanya dinamika pertumbuhan yang cenderung inkremental. Berikut analisis komprehensif terhadap faktor keberhasilan, tantangan, dan rekomendasi solusi:

### 1) Faktor Keberhasilan

#### a. Program Pelatihan Kewirausahaan Terstruktur

Peningkatan kualitas UKM didukung oleh program pelatihan berbasis kompetensi, seperti pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, inkubasi bisnis dan standarisasi produk. Data menunjukkan 85% peserta pelatihan mengalami peningkatan produktivitas dan adopsi teknologi sederhana.

#### b. Akses Pembiayaan yang Inklusif

Kolaborasi dengan perbankan dan lembaga keuangan non-konvensional melalui skema Subsidi Bunga daerah berhasil meningkatkan akses pembiayaan bagi UKM.

c. Integrasi Pasar Digital

Konsistensi pembinaan dan pendampingan pemasaran digital berdampak pada peningkatan omset 23% UKM yang terdaftar, serta perluasan jangkauan pasar hingga tingkat regional.

2) Identifikasi Kegagalan/Tantangan

a. Pertumbuhan Kualitas yang Tidak Signifikan

Meskipun target tercapai, laju peningkatan kualitas UKM hanya 0,71% (dari 11,11% pada 2023 ke 11,82% pada 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi program untuk mempercepat transformasi kualitas.

b. Keterbatasan Akses ke Pelatihan Lanjutan

Sebanyak 65% UKM masih terkendala dalam mengakses pelatihan berbasis teknologi maju (seperti IoT dan automasi), sehingga menghambat peningkatan nilai tambah produk.

c. Disparitas Akses Pasar Antarwilayah

UKM di wilayah terpencil (seperti Kecamatan Alian, sadang , Ayah dan Padureso) hanya menyumbang 12% dari total UKM berkualitas, akibat minimnya infrastruktur logistik dan jaringan pemasaran terintegrasi.

3) Rekomendasi Solusi Strategis

a. Penguatan Program Pelatihan Berbasis Teknologi

- Mengembangkan modul pelatihan advanced seperti digital supply chain, analisis data pasar, dan sertifikasi halal berbasis aplikasi.
- Membentuk hub inovasi di tiap kecamatan sebagai pusat pelatihan dan inkubasi UKM berbasis teknologi.

b. Optimalisasi Skema Pendampingan Berkelanjutan

- Memperluas program pendampingan teknis oleh konsultan PLUT melalui skema one subdistrict one facilitator (OSOF) untuk memastikan implementasi pelatihan dan pasca pelatihan secara berkelanjutan.

c. Penyetaraan Akses Pasar melalui Digitalisasi

- Memperkuat integrasi UKM ke dalam platform e-commerce dan BUMD seperti (Shopee, Tokopedia, Bank , POS).

d. Penguatan Sinergi Multipihak

- Membentuk Forum pemangku kepentingan (pemerintah perguruan tinggi, CSR, asosiasi usaha) untuk pendampingan spesifik sektor unggulan usaha
- Meningkatkan alokasi anggaran untuk program market linkage dan partisipasi dalam pameran berskala nasional/internasional.

Pencapaian target peningkatan kualitas UKM di Kabupaten Kebumen tahun 2024 tidak hanya menjadi indikator keberhasilan program, tetapi juga mencerminkan komitmen holistik pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. Namun, capaian yang bersifat inkremental (hanya 0,71% peningkatan dari tahun sebelumnya) mengisyaratkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi yang selama ini diterapkan. Pertumbuhan yang lambat ini dapat menjadi early warning atas potensi stagnasi jika tidak direspons dengan intervensi berbasis inovasi dan kebijakan progresif.

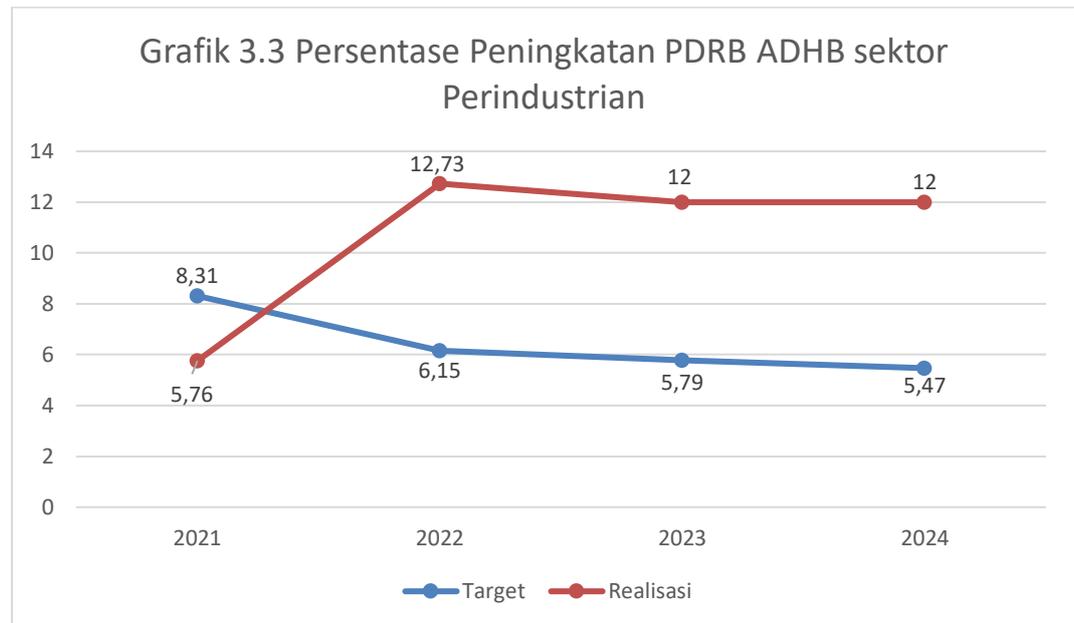
Di sisi lain, keberhasilan dalam integrasi pasar digital dan penyaluran pembiayaan inklusif membuktikan bahwa kolaborasi antar-sektor merupakan kunci utama dalam mempercepat transformasi UKM. Namun, disparitas akses pelatihan dan pasar antarkecamatan menunjukkan bahwa pendekatan "satu ukuran untuk semua" (one-size-fits-all) tidak lagi relevan. Dibutuhkan kebijakan yang lebih terdesentralisasi, berbasis data, dan responsif terhadap karakteristik spesifik wilayah.

Kedepan, keberlanjutan program harus dijamin melalui penguatan kelembagaan, baik dalam bentuk regulasi pendukung maupun penganggaran berbasis kinerja. Penting untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas UKM tidak hanya berorientasi pada kuantitas indikator, tetapi juga pada dampak riil terhadap kesejahteraan pelaku usaha, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi.

Akhirnya, Grafik 3.2 harus menjadi instrumen strategis dalam perencanaan tahun berikutnya, dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas produksi, akses pasar, dan adopsi teknologi. Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi penentu utama dalam mewujudkan UKM

Kebumen yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing global. Dengan demikian, pencapaian ini bukanlah titik akhir, melainkan benchmark untuk lompatan yang lebih transformatif dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal.

### 3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perindustrian



Realisasi PDRB ADHB sektor perindustrian mengalami lonjakan dari 5,76% (2021) menjadi 12,73% (2022), jauh melampaui target 6,15%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pertumbuhan industri, kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan pro-industri, investasi, atau peningkatan permintaan pasar. Meskipun target tetap rendah (5,79% pada 2023 dan 5,47% pada 2024), realisasi tetap stabil di angka 12%. Ini menunjukkan adanya faktor yang menjaga pertumbuhan industri tetap kuat meskipun target yang ditetapkan lebih rendah.

#### 1) Faktor Keberhasilan

- a. Program bantuan Peralatan bagi IKM yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk IKM.
- b. Pendampingan dan Pelatihan mampu meningkatkan keterampilan manajemen dan produksi IKM.
- c. Pembentukan Sentra Industri memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antar IKM, meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran.

- d. Program OVOP mendorong pengembangan produk unggulan daerah, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk IKM.
- e. Fasilitasi Legalitas Perizinan mempermudah IKM untuk beroperasi secara legal dan meningkatkan akses pasar.
- f. Pengelolaan Informasi Industri yang ter update dengan baik membantu IKM mendapatkan informasi penting untuk pengembangan usaha.

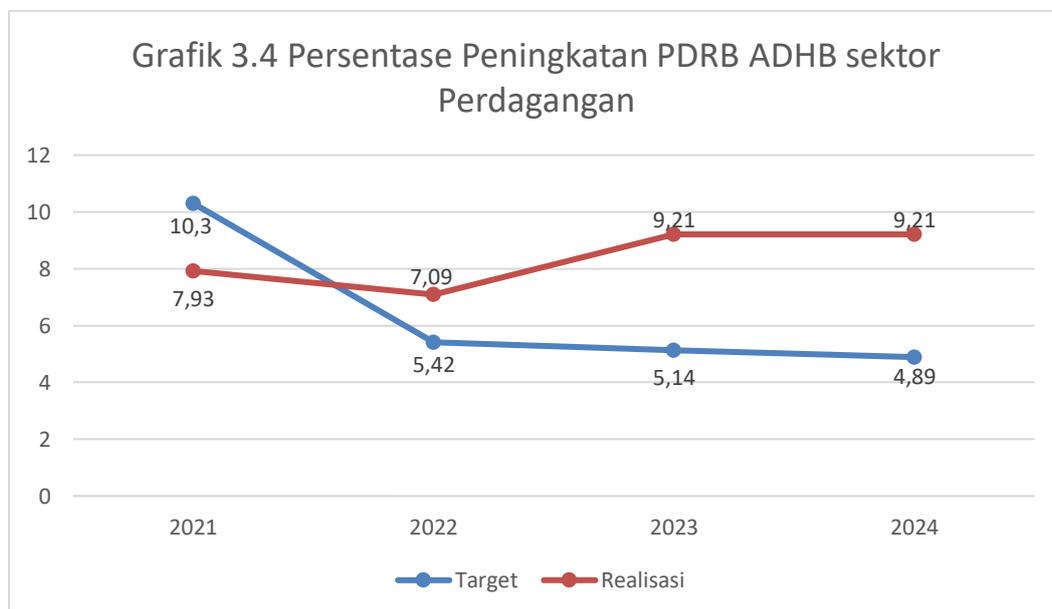
## 2) Faktor Kegagalan

- a. Program-program tersebut tidak Berkelanjutan dan tidak dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang.
- b. Target Tidak Tepat Sasaran dimana beberapa Bantuan tidak diberikan kepada IKM yang paling membutuhkan.
- c. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi yang memadai untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan.
- d. Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Program-program.
- e. Perubahan kondisi ekonomi, persaingan, atau kebijakan lain yang tidak diantisipasi.

## 3) Solusi

- a. Evaluasi Menyeluruh: Lakukan evaluasi yang komprehensif terhadap semua program untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan.
- b. Peningkatan Kualitas Program :
  - Bantuan Peralatan: Pastikan peralatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan IKM dan ada pelatihan penggunaan serta pemeliharaan.
  - Pendampingan dan Pelatihan: Fokus pada peningkatan kualitas SDM, inovasi produk, dan manajemen keuangan.
  - Fasilitasi Perizinan: Sederhanakan proses perizinan dan berikan pendampingan agar IKM dapat memenuhi persyaratan.
  - Pengelolaan Informasi Industri: Berikan informasi yang relevan dan mudah diakses, serta pelatihan tentang cara memanfaatkannya.

- c. Pendekatan Berkelanjutan dengan merancang program yang memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan, misalnya dengan memberikan pendampingan secara berkala atau memfasilitasi akses ke pembiayaan.
  - d. Sentra industri memiliki fasilitas yang lengkap dan dikelola dengan baik, serta memfasilitasi akses pasar bagi IKM.
  - e. Dukungan yang berkelanjutan bagi pengembangan produk OVOP, termasuk pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan promosi
  - f. Keterlibatan Pihak Terkait: Libatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan sektor swasta, dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
  - g. Monitoring dan Evaluasi Rutin: Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.
  - h. Responsif terhadap Perubahan: Pantau perubahan kondisi ekonomi dan industri, serta sesuaikan program jika diperlukan.
4. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Meningkatnya Daya Saing Perdagangan



Pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan (7,93% menjadi 10,3%). Ini mengindikasikan bahwa program-program seperti pembangunan sarana prasarana pasar, pembinaan PKL, tera ulang UTTP, pelatihan ekspor, pameran, stabilisasi harga, pengawasan barang

bersubsidi, Sistem Resi Gudang, Dekranasda, dan fasilitasi pemasaran ke pasar modern memberikan dampak positif pada periode ini. Tahun 2023-2024 terjadi penurunan dan stagnasi (10,3% menjadi 9,21% lalu 9,21% lagi). Ini mengindikasikan bahwa efektivitas program-program tersebut mulai menurun atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi PDRB sektor perdagangan.

1) Analisis Keberhasilan :

- a. Pembangunan Sarana Prasarana Pasar meningkatkan fasilitas dan kenyamanan pasar, menarik lebih banyak pengunjung dan pedagang.
- b. Pembinaan dan Penempatan PKL membantu PKL naik kelas dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian.
- c. Tera Ulang UTTP menciptakan persaingan yang sehat dan melindungi konsumen.
- d. Pelatihan Ekspor meningkatkan kemampuan eksportir dalam menembus pasar internasional.
- e. Kegiatan Pameran yang mempromosikan produk-produk unggulan dan memperluas jaringan pemasaran.
- f. Program Stabilitas Harga untuk menjaga harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau.
- g. Pengawasan Barang Bersubsidi memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
- h. Sistem Resi Gudang memfasilitasi penyimpanan dan pembiayaan komoditas pertanian.
- i. Adanya Dekranasda mendorong pengembangan produk kerajinan dan UMKM.
- j. Fasilitasi Pemasaran ke Pasar Modern membantu produk IKM masuk ke pasar modern dan meningkatkan daya saing.

2) Analisis Kegagalan:

- a. Tidak Berkelanjutan dimana Program-program tersebut tidak dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang.
- b. Target Tidak Tepat Sasaran dimana bantuan tidak sampai kepada pelaku usaha yang paling membutuhkan.

- c. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi yang memadai untuk mengukur efektivitas program dan melakukan perbaikan.
  - d. Kurangnya Koordinasi Program-program dengan baik antar instansi terkait.
  - e. Perubahan kondisi ekonomi, persaingan, atau kebijakan lain yang tidak diantisipasi.
- 3) Solusi:
- a. Evaluasi Menyeluruh : Lakukan evaluasi yang komprehensif terhadap semua program untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan.
  - b. Peningkatan Kualitas Program:
    - Pastikan program-program tersebut relevan dengan kebutuhan pelaku usaha dan perkembangan pasar.
    - Berikan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha.
    - Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar.
    - Perluas akses pasar bagi produk-produk IKM.
    - Tingkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait perdagangan.
  - c. Pendekatan Berkelanjutan dengan merancang program yang memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan, misalnya dengan memberikan pendampingan secara berkala atau memfasilitasi akses ke pembiayaan.
  - d. Melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, asosiasi pedagang, perguruan tinggi, dan sektor swasta, dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
  - e. Monitoring dan Evaluasi Rutin untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.
  - f. Koordinasi yang Lebih Baik dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait agar program-program dapat berjalan sinergis dan efektif.
  - g. Responsif terhadap Perubahan dengan memantau perubahan kondisi ekonomi dan industri, serta penyesuaian program.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebesar 35.400.945.670,00 yang teralokasikan pada 14 (empat belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp. 33,351,783,134,00 yang terdiri dari ;

- 1) Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah anggaran sebesar Rp. 5.109.535.223,-
- 2) Urusan Perdagangan anggaran sebesar Rp. 26.851.019.527,- yang terbagi lagi menjadi
- 3) Urusan Perindustrian anggaran sebesar Rp. 1.391.228.384,-

Realisasi total anggaran belanja keuangan adalah sebesar Rp. 33.351.783.134,- atau 94,21%. dari total anggaran sebesar Rp. 35.400.945.670,- dengan capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan pada skala kategori penilaian Baik. Pagu dan realisasi anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2024, tertuang dalam tabel 3.8 dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

**Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen**

NO	PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.400.945.670	33.351.783.134	94,21
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.181.446.000	5.109.535.223	98,61
I	Meningkatnya jumlah Koperasi yang sehat			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.072.000	16.008.223	99,60
01.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	16.072.000	16.008.223	99,60
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	166.797.000	147.510.662	88,44
02.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.797.000	147.510.662	88,44
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	936.543.000	936.281.000	99,97
03.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	936.543.000	936.281.000	99,97
II	Meningkatnya jumlah UMKM yang berkualitas			

NO	PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	111.700.000	110.435.803	98,87
04.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	111.700.000	110.435.803	98,87
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.950.334.000	3.899.299.535	98,71
05.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.950.334.000	3.899.299.535	98,71
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	28.818.773.670	26.851.019.527	93,17
III	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan			
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.273.106.000	10.178.272.497	90,29
06.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.787.000	57.618.530	99,71
06.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.138.292.000	9.131.790.539	90,07
06.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.010.000	205.378.756	99,69
06.04	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.439.000	28.793.000	91,58
06.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.578.000	516.196.899	86,09
06.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	238.494.773	99,37
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	16.095.784.670	15.231.044.425	94,63
07.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.734.804.670	14.038.878.851	95,28
07.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.360.980.000	1.192.165.574	87,60
8	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	166.762.000	166.530.321	99,86
08.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	88.256.000	88.138.641	99,87
08.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	78.506.000	78.391.680	99,85
9	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	88.108.000	88.068.400	99,96
09.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.108.000	88.068.400	99,96
10	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	163.543.000	160.461.367	98,12
10.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	163.543.000	160.461.367	98,12
11	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.031.470.000	1.026.642.517	99,53
11.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.031.470.000	1.026.642.517	99,53
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.400.726.000	1.391.228.384	99,32
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.400.726.000	1.391.228.384	99,32
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.278.454.000	1.270.313.684	99,36

NO	PROGRAM, KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU	REALISASI	%
12.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.278.454.000	1.270.313.684	99,36
13	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>86.156.000</b>	<b>85.748.500</b>	<b>99,53</b>
13.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	86.156.000	85.748.500	99,53
14	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>36.116.000</b>	<b>35.166.200</b>	<b>97,37</b>
14.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	36.116.000	35.166.200	97,37
	<b>JUMLAH</b>	<b>35.400.945.670</b>	<b>33.351.783.134</b>	<b>94,21</b>

Total anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebesar Rp. 35.400.945.670,- terealisasi sebesar Rp. 33.351.783.134,- atau 94,21%, sisa anggaran Rp. 2.049.162.536,-, deviasi 5,79% dari total pagu anggaran.

Dari 21 kegiatan yang ada, ada 3 kegiatan yang kinerja keuangan di bawah 90% yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota mencapai 88,44%, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 86,06%, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya mencapai 87,60% dan yang tertinggi adalah kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota mencapai 99,97%. Sedangkan secara umum kinerja keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 mencapai 94,21%. Evaluasi kinerja keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.13 Tabel Range Capaian Kegiatan Tahun 2024**

No	Program	Jumlah Kegiatan	Range Capaian 90-100%	Range Capaian <90%
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1 keg	1 keg	
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1 keg		1 keg
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1 keg	1 keg	
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	1 keg	1 keg	

5	Program Pengembangan Umkm	1 keg	1 keg	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 keg	5 keg	1 keg
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2 keg	1 keg	1 keg
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2 keg	2 keg	
9	Program Pengembangan Ekspor	1 keg	1 keg	
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1 keg	1 keg	
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1 keg	1 keg	
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1 keg	1 keg	
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1 keg	1 keg	
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1 keg	1 keg	

Bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen adalah salah satu OPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Penginapan/pesanggrahan/villa. Rincian atas target dan realisasi PAD sebagaimana tabel 3.9.

**Tabel 3. 9 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

No	Pendapatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Pasar	7.529.001.000	6.230.853.615	82,76	7.722.334.000	7.232.868.182	93,66
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	109.727.000	160.709.460	146,46	317.727.000	64.178.750	20,20
3	Retribusi Pelayanan Penginapan/ pesanggrahan/villa	24.920.000	27.610.000	110,79	24.920.000	25.050.000	100,52
	Total	7.663.648.000	6.419.173.075	83,76	8.064.981.000	7.322.096.932	90,78

Dari tiga objek pendapatan retribusi di atas, terdapat dua objek yang tidak tercapai 100%, yaitu Retribusi Pelayanan Pasar hanya mencapai 93,66% hal ini disebabkan pendapatan retribusi pelayanan pasar belum maksimal karena sebagian besar adanya kios dan los yang tidak aktif berjualan (Tutup dan tidak aktif berjualan) hal ini berpengaruh terhadap penurunan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Untuk retribusi kios dan los terdapat tunggakan pedagang sehingga berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pendapatan. Gedung pertemuan/penginapan juga mengalami penurunan pengguna, karena biaya sewa gedung pemerintah lebih tinggi.

Selain mengelola sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen juga melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD DBHCHT sebagaimana tabel 3.10.

**Tabel 3.10. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana dari APBD DBHCHT di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024**

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Pembangunan Gedung Sentra Hasil Tembakau	Petanahan	APBD (DBHCHT)	Pembangunan Gedung SIHT Pagu Rp 669.000.- Realisasi Rp 668.967.000,- (99,995%)
2	Pengawasan Pembangunan Gedung Dan Bangunan SIHT	Petanahan	APBD (DBHCHT)	Pengawasan Pembangunan Gedung Dan Bangunan SIHT pagu 10.000.000,- realisasi sebesar Rp. 9.435.000,- (94,35 %)
3	Perencanaan DED Pembangunan Gedung Tahap 2 dan Jembatan SIHT	Petanahan	APBD (DBHCHT)	Perencanaan DED Pembangunan Gedung Tahap 2 dan Jembatan SIHT pagu Rp 30.000.000 ,-dan realisasi Rp 29.082.000,- (96,94%)

Di Tahun Anggaran 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen juga mendapat Dana Tugas Pembantuan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Pagi Kebumen dengan rincian sebagaimana table 3.11.

**Tabel 3.11. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Tugas Pembantuan di wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024**

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementerian Perdagangan RI	SP DIPA-090.02.4.039600/2023	Program Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen	3.000.000.000	2.838.093.699	94.60%	1	100%	

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA-090.02.03.039600/2024 tanggal 9 Oktober 2024 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan, Rincian Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembangunan Pasar Rakyat Pagi Kebumen di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 3.000.000.000,- terealisasi Rp. 2.838.039.699,- atau sebesar 94,60%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 untuk mencapai target kinerja Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### **1.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

- 1) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase koperasi sehat tercapai 165,76% dengan kategori sangat baik. Didukung 3 program dengan capaian indikator program rata – rata 226,34% dengan kategori sangat baik.
  
- 2) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase usaha kecil menengah yang berkualitas tercapai 100,51% dengan kategori sangat baik. Didukung 2 program dengan capaian indikator program rata – rata 193,92% dengan kategori sangat baik.
  
- 3) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase peningkatan PDRB sektor Perindustrian 219,38% dengan kategori sangat baik. Didukung 3 program dengan capaian indikator program rata – rata 117,54% dengan kategori sangat baik.
  
- 4) Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya persentase peningkatan PDRB sektor Perdagangan tercapai 188,34% dengan kategori sangat baik. Didukung 5 program dengan capaian indikator program rata – rata 520,97% dengan kategori sangat baik.
  
- 5) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 telah ditetapkan Anggaran Belanja Sebesar Rp. 35.400.945.670,- (Tiga Puluh Lima Miliar Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus

Tujuh Puluh Rupiah) dan pada pelaksanaan kegiatannya terealisasi sebesar Rp. 33.351.783.134,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau 94,21%.

Secara umum semua rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan kategori baik. Hal ini dapat diambil suatu analisa tingkat efisiensi masing-masing kegiatan dengan membandingkan capaian kinerja.

Dari hasil capaian kinerja yang baik dari tiap-tiap kegiatan tersebut tidak terlepas dari adanya faktor pendukung yang antara lain :

1) SDM yang Kompeten dan Kolaboratif.

Peningkatan SDM Kompeten melalui kesempatan pelatihan, bintek dan diklat sehingga menghasilkan sdm yang berkualitas dan mampu berkolaborasi antar setiap bidang yang menghasilkan tingkat sinergitas optimal dalam mencapai target kerja baik dalam skala individu maupun organisasi.

2) Koordinasi Multidimensi Antar Pemangku Kepentingan.

Sinergi antar pihak terkait terlihat dari notulen rapat koordinasi dan surat-menyurat resmi. Kolaborasi ini memungkinkan penyelesaian masalah secara cepat, seperti tertulis dalam Laporan Progres Bulanan.

3) Dukungan Infrastruktur dan Anggaran yang Memadai.

Ketersediaan sarana prasarana dan alokasi anggaran yang transparan meminimalisir gangguan teknis. Pembiayaan yang tepat sasaran tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan.

Pemantauan berkala melalui Formulir Monitoring Harian membantu mengidentifikasi penyimpangan sejak dini. Hasil evaluasi tengah periode menjadi acuan perbaikan strategi pelaksanaan.

5) Adaptabilitas Terhadap Perubahan Kondisi.

Fleksibilitas tim dalam menyesuaikan rencana dengan dinamika lapangan terlihat dalam Laporan Revisi Kegiatan. Contohnya, penambahan sesi pendampingan sebagai respons atas masukan peserta.

6) Keterkaitan dengan Analisis Capaian Kinerja.

Seluruh faktor di atas tidak hanya menjelaskan keberhasilan kegiatan, tetapi juga menjawab peningkatan capaian kinerja tahun berkenaan dan tahun sebelumnya sebesar 49,76% (Grafik 3.4). Data tersebut memperlihatkan konsistensi antara perencanaan, realisasi, dan output yang terdokumentasi secara holistik dalam laporan ini.

## 1.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/ kendala yang dihadapi tidak tercapainya kinerja sasaran program dan kegiatan diantaranya :

1) Ketidakselarasan Kebijakan Refocusing Anggaran dengan Target Renstra. Realokasi anggaran sebagai respons terhadap perubahan prioritas nasional tidak diikuti penyesuaian indikator kinerja. Akibatnya, terjadi disparitas antara kemampuan pendanaan dan target kinerja yang tetap mengacu pada dokumen perencanaan awal, sehingga memicu ketidakefektifan pencapaian sasaran program;

2) Dampak Perubahan Regulasi.

Dinamika kebijakan sektoral dan revisi peraturan teknis di tingkat pusat memerlukan penundaan sementara pelaksanaan kegiatan untuk proses realignment. Kondisi ini mengakibatkan akumulasi pekerjaan di akhir periode, berpotensi mengganggu kualitas output;

3) Defisit Kapasitas SDM pada Tingkat Operasional.

Rasio jumlah pegawai terhadap volume pekerjaan di tingkat kabupaten tidak proporsional (1:5). Beban ganda ini mengurangi kapasitas responsif tim dalam memenuhi target kinerja yang bersifat multisectoral; Tantangan Sosiodemografis dalam Optimalisasi Partisipasi Publik. Heterogenitas karakteristik masyarakat dari berbagai aspek (tingkat literasi 62%, disparitas akses teknologi 35%, dan mobilitas penduduk 22%) menciptakan kompleksitas dalam menyusun strategi keterlibatan publik yang inklusif. Kondisi ini berdampak pada capaian partisipasi aktor lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan skala prioritas program, meskipun telah dilakukan adaptasi metode sosialisasi berbasis kearifan local;

4) Kendala Logistik dalam Distribusi Sumber Daya.

Ketidakteraturan dalam rantai pasok logistik pokok menyebabkan keterlambatan distribusi peralatan pendukung kegiatan ke wilayah terpencil. Kondisi geografis yang kompleks dan minimnya akses transportasi memperparah ketidaktepatan waktu efektifitas pelaksanaan kegiatan.

### **1.3. Strategi Peningkatan Kinerja yang Akan Datang**

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja serta menjawab tantangan dan kebutuhan di masa mendatang, Pemerintah merumuskan strategi peningkatan kinerja yang terintegrasi, sistematis, dan berorientasi pada hasil. Strategi ini disusun berdasarkan evaluasi kinerja sebelumnya, analisis gap, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan aspirasi pemangku kepentingan. Adapun langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan meliputi :

1) Penguatan Kerangka Kebijakan dan Perencanaan.

Pemerintah akan melakukan penyelarasan kebijakan dan perencanaan program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta prioritas nasional. Hal ini mencakup revisi indikator kinerja yang relevan dengan dinamika global dan lokal, serta integrasi prinsip evidence-based policy untuk memastikan akurasi dan responsivitas kebijakan.

2) Optimalisasi Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dari sisi SDM akan difokuskan pada modernisasi sistem manajemen, dan penguatan tata kelola berbasis teknologi.

3) Penerapan Inovasi dan Transformasi Digital.

Transformasi layanan publik akan dipercepat melalui integrasi sistem digital dalam proses kerja, pelayanan, dan pengawasan.

4) Keberpihakan pada Peningkatan Daya Saing Pelaku Usaha Industri, UMKM, dan Sektor Perdagangan.

Sebagai implementasi Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkukm), strategi difokuskan pada :

- a. Pemberdayaan UMKM dan Industri Kecil melalui kemudahan akses permodalan, pendampingan teknis, pelatihan kewirausahaan, serta integrasi UMKM ke dalam platform digital dan pasar global.
  - b. Penguatan Rantai Pasok Industri dengan memfasilitasi kemitraan antara pelaku industri besar, UMKM, dan koperasi untuk meningkatkan nilai tambah produk dan perluasan jaringan pemasaran.
  - c. Revitalisasi Pasar Tradisional dan Modern melalui infrastruktur berstandar nasional, digitalisasi transaksi, serta peningkatan kualitas SDM pedagang.
  - d. Promosi Produk Lokal dan Ekspor dengan memanfaatkan jaringan diplomasi perdagangan, pameran berskala nasional/internasional, dan insentif fiskal/nonfiskal bagi pelaku usaha.
  - e. Pengawasan dan Perlindungan Pasar melalui penegakan regulasi perdagangan yang adil, pemberantasan praktik monopoli, serta pengendalian harga komoditas strategis.
- 5) Penguatan Kolaborasi Multipihak.  
Sinergi dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat akan ditingkatkan melalui forum koordinasi terstruktur, kemitraan strategis, serta mekanisme sharing resources. Kolaborasi ini bertujuan memperluas dampak program, mengurangi tumpang tindih, dan memastikan keterlibatan aktif seluruh pihak dalam pembangunan.
- 6) Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Outcome.
- 7) Pemerintah akan merevitalisasi sistem pemantauan dan evaluasi dengan menerapkan indikator outcome dan dampak, serta menggunakan teknologi *real-time reporting*. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan, alokasi anggaran berbasis kinerja, dan pertanggungjawaban publik yang transparan.
- 8) Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.  
Strategi ini akan didukung oleh penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk audit kinerja, pelaporan publik yang mudah diakses, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui kanal aduan dan platform partisipatif.

Dengan implementasi strategi di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai peningkatan kinerja yang signifikan, berkelanjutan, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta amanat konstitusi.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN KEBUMEN



Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda

NIP. 196701261986071001

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2024
- Lampiran 2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024
- Lampiran 3. Prestasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 89 Kebumen Telepon.: 0287-384434  
Faksimile : 0287-384434 e-mail: [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website: [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) Kode Pos 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.  
Jabatan : Bupati Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan : Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Sektor Sekunder								
1	Sasaran: PDRB ADHK Sektor Sekunder	Prosentase Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	%	46,67				46,67
		Prosentase Meningkatnya UMKM yang berkualitas	%	11,76				11,76
		Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	5,47				5,47
Tujuan : Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Sektor Tersier								
2	Sasaran : PDRB ADHK Sektor Tersier	Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perdagangan	%	4,89				4,89

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 16.072.000,-	
2.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 165.297.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 1.136.543.000,-	
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 111.700.000,-	
4.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 2.105.414.000,-	
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.11.411.581.000,-	
6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.12.173.703.000,-	
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 166.012.000,-	
8.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 87.608.000,-	
9.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 163.043.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 815.075.000,-
11.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 1.309.274.000,-
12.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 85.656.000,-
13.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 35.866.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.29.782.844.000,-</b>

Kebumen, 11 Januari 2024

Bupati Kebumen

Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan HM. Sarbini No. 85 Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen  
Kodepos 54316 Telp. (0287) 384434 Fax. (0287) 384434  
Web [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) e-mail: [disperindag@kebumenkab.go.id](mailto:disperindag@kebumenkab.go.id)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.  
Jabatan : Bupati Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Agustus 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19740326 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN**  
**MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Sektor Sekunder								
1	Sasaran: PDRB ADHK Sektor Sekunder	Prosentase Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	%	53,33	13,33	26,67	40,00	53,33
2		Prosentase Meningkatnya UMKM yang berkualitas	%	12,31	0,38	1,19	12,03	12,31
		Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	5,19				5,19
Tujuan : Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Sektor Tersier								
2	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Sektor Tersier	Prosentase Peningkatan PDRB ADHB Sektor Perindustrian	%	4,66				4,66

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 16.072.000,-	
2.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp. 63.369.000,-	
3.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp. 86.543.000,-	
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 77.250.000,-	
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.716.020.000,-	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 12.008.330.000,-	
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 10.566.364.000,-	
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp. 106.804.000,-	
9.	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 70.520.000,-	
10.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 147.755.000,-	
11.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 1.314.529.000,-	
12.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 802.180.000,-	
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 60.024.000,-	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 10.234.000,-	
	JUMLAH	Rp. 27.045.994.000,-	

Bupati Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto

Kebumen, 26 Agustus 2024  
Kepala DisperindagKUKM  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19740326 199903 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Isnadi, S.AP.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Udy Cahyono, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 196702261986071001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Isnadi, M.AP.  
Pembina Tk I - IV / b  
NIP. 197707061997031004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Sekretaris Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,**  
**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Kebumen**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya PDRB ADHK Sektor Perdagangan	Cakupan Pelayan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%

No.	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 11.411.581.000

Kebumen, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Kebumen

Sekretaris Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Isnadi, M.AP.  
Pembina Tk. I - IV / b  
NIP. 197707061997031004

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Riyanto, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ma'rifah, S.IP., M.M.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil  
dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 19740126 199903 1 004

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Ma'rifah, S.IP., M.M.  
Pembina - IV / a  
NIP. 19740425 199603 2 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Sekretaris Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,**  
**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Kebumen**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya PDRB ADHB Sektor Perdagangan	Cakupan Pelayan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				100%

No.	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 11.411.581.000

Kebumen, 11 Januari 2024

Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Kebumen

Sekretaris Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 19740126 199903 1 004



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Ma'rifah, S.IP., M.M.  
Pembina - IV / a  
NIP. 19740425 199603 2 002

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Riyanto, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 19701101 199803 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Yanto, S.KM., M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Haryono Wahyudi, S.T, M.T.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 197401261999031004

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Tri Yanto, S.KM., M.Si.  
Pembina - IV / a  
NIP. 196711271994011001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan : Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Sektor Sekunder							
	Prosentase peningkatan PDRB ADHB sektor perindustrian	Jumlah pelaku industri yang terbina	orang	100				100
		jml dokumen perijinan industri yg terfasilitasi	Dokumen	45				45
		Jumlah Dokumen Data Industri	Dokumen	1				1

No.	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 1.309.274.000,-	
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 85.656.000,-	
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 35.866.000,-	

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Haryono Wahyudi, S.T, M.T.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 197401261999031004

Tri Yanto, S.KM., M.Si.  
Pembina - IV / a  
NIP. 196711271994011001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Riyanto, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik  
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rud Tomico El Umam, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Rud Tomico El Umam, S.H., M.H.  
Penata Tk I - III / d  
NIP. 198801252011011005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,**  
**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Kebumen**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan :							
	Meningkatnya Kegiatan Ekonomi Sektor Sekunder							
	Sasaran: Prosentase peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	4				4
		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	4				4
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Doc	4				4
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Doc	4				4

No.	Nama Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 11.009.857.000,-	
2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Rp 1.163.846.000,-	

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196702261986071001

Rud Tomico El Umam, S.H., M.H.  
Penata Tk I - III / d  
NIP. 198801252011011005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Riyanto, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik  
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Danang Dwi Hartanto, S.STP., M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Danang Dwi Hartanto, S.STP., M.Si.  
Pembina - IV / a  
NIP. 198402012002121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas pada Dinas Perindustrian,**  
**Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Kebumen**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Prosentase Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	85 Unit				85
		Jumlah SDM koperasi yang kompeten	150 Orang				150
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Unit				120
2	Prosentase Meningkatnya UMKM yang berkualitas	Jumlah Usaha Mikro yang teridentifikasi berpotensi naik kelas	220 Unit				220
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	120 Unit				120
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	14 Unit				14
		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam	250 Unit				250



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					
--	--	---	--	--	--	--	--

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	16.072.000,-
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp	165.297.000,-
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	1.136.543.000,-
4.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	111.700.000,-
5.	Program Pengembangan UMKM	Rp	2.105.414.000,-

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 196702261986071001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Danang Dwi Hartanto, S.STP., M.Si.  
Pembina - IV / a  
NIP. 198402012002121001

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Edi Riyanto, S.T., M.T.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Basori, S.IP.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  
Kebumen  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 196702261986071001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Basori, S.IP.  
Pembina - IV / a  
NIP. 196908181990031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas pada Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Prosentase peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	381 Lap				381
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Lap				365
		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	3 Pelaku				3
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM				50

No.	Nama Program		Anggaran
1.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	166.012.000,-
2.	Program Pengembangan Ekspor	Rp	87.608.000,-
3.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	815.075.000,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda - IV / c  
NIP. 196702261986071001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Basori, S.IP.  
Pembina - IV / a  
NIP. 196908181990031007

Mengetahui,  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Edi Riyanto, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 197011011998031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nani Kusumawati, S.E.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Isnadi, M.AP.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Isnadi, M.AP.  
Pembina Tk I - IV / b  
NIP. 197707061997031004

Nani Kusumawati, S.E.  
Penata Tk I - III / d  
NIP. 196707241989112001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,**  
**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Kebumen**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Prosentase peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun dan Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	16 Dok	4	3	3	6
		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	3	3	3	3

No.	Nama Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 57.537.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.515.291.000,-

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

**Drs. Isnadi, M.AP.**  
**Pembina Tk I - IV / b**  
**NIP. 197707061997031004**

**Nani Kusumawati, S.E.**  
**Penata Tk I - III / d**  
**NIP. 196707241989112001**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik  
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yasinta Swasti Mahargyani, S.Mn.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ma'rifah, S.IP., M.M.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Ma'rifah, S.IP., M.M.  
Pembina - IV / a

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yasinta Swasti Mahargyani, S.Mn.  
Penata Tk I - III / d



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 197404251996032002

NIP. 197505101999032007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas pada Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Prosentase peningkatan PDRB ADHB sektor perdagangan	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	12 Bln	3	3	3	3
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	2			
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bln	3	3	3	3
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit	2	2	2	2

No.	Nama Kegiatan		Anggaran
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	150.500.000,-
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	13.000.000,-
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	435.253.000,-
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	240.000.000,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Ma'rifah, S.IP., M.M.  
Pembina - IV / a  
NIP. 197404251996032002

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yasinta Swasti Mahargyani, S.Mn.  
Penata Tk I - III / d  
NIP. 197505101999032007

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Haryono Wahyudi, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 197401261999031004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor : 89 Kebumen Telp. : 0287-384434  
Fax.: 0287-384434 e-mail : [dinasperindag@kebumenkab.go.id](mailto:dinasperindag@kebumenkab.go.id)  
Website : [disperindag.kebumenkab.go.id](http://disperindag.kebumenkab.go.id) - 54316

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amalul Umam, SE  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Isnadi, M.AP.  
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Isnadi, M.AP.  
Pembina Tk I - IV / b  
NIP. 197707061997031004

Amalul Umam, SE  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 197211252007011004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Perindustrian,  
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan : Peningkatan PDRB ADHB sektor perindustrian							
	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	kegiatan	8				8
		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (bulan)	bulan	3	3	3	3	3
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	3	3	3	3	3
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	11	17	20	30	11

No.	Nama Program	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 0,-	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 206.010.000,-	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 31.439.00,-	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 599.578.000,-	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 240.000.000,-	

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Isnadi, M.AP.  
Pembina Tk I - IV / b  
NIP. 197707061997031004

Amalul Umam, SE  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 197211252007011004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik  
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengetahui,

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

Drs. Udy Cahyono, M.Si.  
Pembina Utama Muda – IV / c  
NIP. 196702261986071001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik  
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel T-C.24.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
 Kabupaten Kebumen

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	20.325.406.000	20.566.802.000	33.986.859.850	35.400.945.670	27.131.720.000	17.675.050.761	19.723.702.287	31.167.260.225	33.351.783.134		86,96	95,90	91,70	94,21	0,00	27.482.346.704	25.479.449.102
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	763.390.000	1.063.134.000	2.083.847.000	5.181.446.000	1.959.254.000	645.089.718	1.033.896.893	266.081.564	5.109.535.223		84,50	97,25	12,77	98,61	0,00	2.210.214.200	1.763.650.850
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	763.390.000	1.063.134.000	2.083.847.000	5.181.446.000	1.959.254.000	645.089.718	1.033.896.893	266.081.564	5.109.535.223		84,50	97,25	12,77	98,61	0,00	2.210.214.200	1.763.650.850
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	0	0	16.072.000	16.072.000	0	0	0	16.008.223		0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	6.428.800	4.002.056
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	16.072.000	16.072.000	0	0	0	16.008.223		0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	6.428.800	4.002.056
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	16.072.000	16.072.000	0	0	0	16.008.223		0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	6.428.800	4.002.056
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	241.326.000	213.978.000	277.287.000	166.797.000	63.369.000	218.787.866	211.104.496	266.081.564	147.510.662		90,66	98,66	95,96	88,44	0,00	192.551.400	210.871.147
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.326.000	213.978.000	277.287.000	166.797.000	63.369.000	218.787.866	211.104.496	266.081.564	147.510.662		90,66	98,66	95,96	88,44	0,00	192.551.400	210.871.147
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.326.000	213.978.000	277.287.000	166.797.000	63.369.000	218.787.866	211.104.496	266.081.564	147.510.662		90,66	98,66	95,96	88,44	0,00	192.551.400	210.871.147
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	0	0	936.543.000	86.543.000	0	0	0	936.281.000		0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	204.617.200	234.070.250
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	936.543.000	86.543.000	0	0	0	936.281.000		0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	204.617.200	234.070.250
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	936.543.000	86.543.000	0	0	0	936.281.000		0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	204.617.200	234.070.250
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	522.064.000	849.156.000	1.806.560.000	111.700.000	77.250.000	426.301.852	822.792.397	0	110.435.803		81,66	96,90	0,00	98,87	0,00	673.346.000	339.882.513
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	522.064.000	849.156.000	1.806.560.000	111.700.000	77.250.000	426.301.852	822.792.397	0	110.435.803		81,66	96,90	0,00	98,87	0,00	673.346.000	339.882.513
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	131.760.000	224.956.000	40.000.000	68.505.000	68.505.000	112.046.100	219.023.819	0	68.320.053		85,04	97,36	0,00	99,73	0,00	106.745.200	99.847.493
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	390.304.000	624.200.000	1.766.560.000	43.195.000	8.745.000	314.255.752	603.768.578	0	42.115.750		80,52	96,73	0,00	97,50	0,00	566.600.800	240.035.020
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	0	0	3.950.334.000	1.716.020.000	0	0	0	3.899.299.535		0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	1.133.270.800	974.824.884
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0	0	0	3.950.334.000	1.716.020.000	0	0	0	3.899.299.535		0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	1.133.270.800	974.824.884
Pengembangan Usaha Mikro	0	0	0	3.950.334.000	1.716.020.000	0	0	0	3.899.299.535		0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	1.133.270.800	974.824.884
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	19.562.016.000	19.503.668.000	31.903.012.850	30.219.499.670	25.172.466.000	17.029.961.043	18.689.805.394	30.901.178.661	28.242.247.911		87,04	95,83	96,86	93,46	0,00	25.272.132.504	23.715.798.252
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.489.473.000	18.526.668.000	30.740.958.850	28.818.773.670	24.214.302.000	14.730.822.288	17.762.142.493	29.748.158.745	26.851.019.527		89,33	95,87	96,77	93,17	0,00	23.758.035.104	22.273.035.763
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.185.408.000	12.358.658.000	11.015.281.850	11.273.106.000	12.008.330.000	10.609.583.878	11.710.419.325	10.385.166.024	10.178.272.497		87,07	94,75	94,28	90,29	0,00	11.768.156.770	10.720.860.431
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	85.000.000	48.554.000	57.787.000	75.000.000	75.295.175	84.081.965	36.383.250	57.618.530		88,58	98,92	74,93	99,71	0,00	70.268.200	63.344.730
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	33.554.000	42.787.000	60.000.000	47.168.775	49.538.450	33.332.775	42.647.400		94,34	99,08	99,34	99,72	0,00	47.268.200	43.176.850
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	28.126.400	34.543.515	3.050.475	14.951.130		80,36	98,70	20,34	99,67	0,00	23.000.000	20.167.880
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.618.775.000	10.937.928.000	9.934.024.850	10.138.292.000	10.976.730.000	9.412.209.442	10.339.067.402	9.453.701.962	9.131.790.539		88,64	94,52	95,16	90,07	0,00	10.521.149.970	9.584.192.336
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.503.775.000	10.810.198.000	9.836.916.850	10.030.922.000	10.897.994.000	9.301.197.942	10.221.985.416	9.358.265.979	9.027.956.115		88,55	94,56	95,13	90,00	0,00	10.415.961.170	9.477.351.363
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.000.000	127.730.000	97.108.000	107.370.000	78.736.000	111.071.500	117.081.986	95.435.983	103.834.424		96,53	91,66	98,28	96,71	0,00	105.188.800	106.840.973
Administrasi Umum Perangkat Daerah	415.600.000	423.239.000	179.600.000	206.010.000	150.500.000	415.279.325	422.300.516	177.304.270	205.378.754		99,92	99,78	98,72	99,69	0,00	274.989.800	305.065.717
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	25.000.000	12.600.000	10.000.000	10.000.000	19.977.000	24.999.000	12.600.000	9.937.000		99,89	100,00	100,00	99,37	0,00	15.520.000	16.878.250
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000	45.000.000	20.000.000	75.510.000	20.000.000	41.393.000	44.698.500	19.655.350	75.438.000		99,74	99,33	98,28	99,90	0,00	40.402.000	45.296.213
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	205.407.000	80.000.000	50.000.000	50.000.000	199.812.325	205.407.000	80.000.000	49.968.200		99,91	100,00	100,00	99,94	0,00	117.081.400	133.796.881
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	5.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.497.000	5.000.000	0	3.497.000		99,91	100,00	0,00	99,91	0,00	3.100.000	2.998.500
Penyediaan Bahan/Material	54.600.000	63.008.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	54.600.000	62.994.300	14.984.200	14.814.900		100,00	99,98	99,89	98,77	0,00	32.521.600	36.848.350
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	64.824.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	64.497.016	46.465.220	46.465.220	47.741.356		100,00	99,50	96,80	99,46	0,00	60.964.800	63.675.898
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	15.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	14.704.700	3.599.500	3.982.300		0,00	98,03	89,99	99,56	0,00	5.400.000	5.571.625
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.000.000	0	20.000.000	31.439.000	13.000.000	0	0	19.575.000	28.793.000		0,00	0,00	97,88	91,58	0,00	45.887.800	12.092.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000	0	20.000.000	31.439.000	13.000.000	0	0	19.575.000	28.793.000		0,00	0,00	97,88	91,58	0,00	45.887.800	12.092.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.995.000	612.491.000	650.395.000	599.578.000	553.100.000	410.438.150	565.469.829	515.912.945	516.196.899		76,84	92,32	79,32	86,09	0,00	589.911.800	502.004.456
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000	4.995.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	4.990.000	4.290.000	2.000.000	2.000.000		99,90	85,89	89,67	100,00	0,00	3.398.000	3.492.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.000.000	514.000.000	623.395.000	536.253.000	515.500.000	351.494.150	467.870.879	489.274.545	452.896.299		74,00	91,03	78,49	84,46	0,00	532.829.600	440.383.968
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	73.496.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	36.954.000	73.309.950	16.000.000	14.976.000		99,88	99,75	100,00	99,84	0,00	31.299.200	35.309.988
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000	20.000.000	8.000.000	46.325.000	20.600.000	17.000.000	19.999.000	7.948.400	46.324.600		100,00	100,00	99,36	100,00	0,00	22.385.000	22.818.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.038.000	300.000.000	182.708.000	240.000.000	240.000.000	296.361.786	299.499.613	182.288.597	238.494.773		80,74	99,83	99,77	99,37	0,00	265.949.200	254.161.192
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	242.000.000	200.000.000	142.708.000	200.000.000	200.000.000	171.324.234	199.577.313	142.687.197	198.574.323		70,80	99,79	99,99	99,29	0,00	196.941.600	178.040.767
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.038.000	100.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	125.037.550	99.922.300	39.601.400	39.920.450		100,00	99,92	99,00	99,80	0,00	69.007.600	76.120.425
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.983.082.000	4.644.602.000	19.333.696.000	16.095.784.670	10.566.364.000	3.811.927.864	4.578.713.187	18.974.281.612	15.231.044.425		95,70	98,58	98,14	94,63	0,00	10.924.705.734	10.648.991.772
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.885.217.000	3.544.602.000	18.377.407.000	14.734.804.670	9.888.189.000	2.856.534.072	3.521.146.095	18.038.801.155	14.038.878.851		99,01	99,34	98,16	95,28	0,00	9.886.043.934	9.613.840.043
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.055.662.000	1.665.000.000	16.172.707.000	12.057.239.670	7.960.882.000	1.048.106.414	1.645.973.205	15.841.582.713	11.368.112.848		99,28	98,86	97,95	94,28	0,00	7.782.298.134	7.475.943.795
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.829.555.000	1.879.602.000	2.204.700.000	2.677.565.000	1.927.307.000	1.808.427.658	1.875.172.890	2.197.218.442	2.670.766.003		98,85	99,76	99,66	99,75	0,00	2.103.745.800	2.137.896.248
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.097.865.000	1.100.000.000	956.289.000	1.360.980.000	678.175.000	955.393.792	1.057.567.092	935.480.457	1.192.165.574		87,02	96,14	97,82	87,60	0,00	1.038.661.800	1.035.151.729
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	696.680.000	750.000.000	599.432.000	807.273.000	483.743.000	571.180.134	719.660.807	590.486.615	792.154.902		81,99	95,95	98,51	98,13	0,00	667.425.600	668.370.615
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	401.185.000	350.000.000	356.857.000	553.707.000	194.432.000	384.213.658	337.906.285	344.993.842	400.010.672		95,77	96,54	96,68	72,24	0,00	371.236.200	366.781.114
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	193.548.000	873.408.000	218.227.000	166.762.000	106.804.000	182.400.273	830.189.705	217.039.173	166.530.321		94,24	95,05	99,46	99,86	0,00	311.749.800	349.039.868
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	150.050.000	250.000.000	114.544.000	88.256.000	28.548.000	139.298.698	245.994.841	113.705.372	88.138.641		92,83	98,40	99,27	99,87	0,00	126.279.600	146.784.388
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	150.050.000	250.000.000	114.544.000	88.256.000	28.548.000	139.298.698	245.994.841	113.705.372	88.138.641		92,83	98,40	99,27	99,87	0,00	126.279.600	146.784.388
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	43.498.000	623.408.000	103.683.000	78.506.000	78.256.000	43.101.575	584.194.864	103.333.801	78.391.680		99,09	93,71	99,66	99,85	0,00	185.470.200	202.255.480
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43.498.000	623.408.000	103.683.000	78.506.000	78.256.000	43.101.575	584.194.864	103.333.801	78.391.680		99,09	93,71	99,66	99,85	0,00	185.470.200	202.255.480
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0	0	0	88.108.000	70.520.000	0	-	0	88.068.400		0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	31.725.600	22.017.100
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	88.108.000	70.520.000	0	0	0	88.068.400		0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	31.725.600	22.017.100
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0	0	0	88.108.000	70.520.000	0	0	0	88.068.400		0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	31.725.600	22.017.100
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	127.435.000	350.000.000	173.754.000	163.543.000	147.755.000	126.910.273	346.775.551	171.671.936	160.461.367		99,59	99,08	98,80	98,12	0,00	192.497.400	201.454.782
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127.435.000	350.000.000	173.754.000	163.543.000	147.755.000	126.910.273	346.775.551	171.671.936	160.461.367		99,59	99,08	98,80	98,12	0,00	192.497.400	201.454.782
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	127.435.000	350.000.000	173.754.000	163.543.000	147.755.000	126.910.273	346.775.551	171.671.936	160.461.367		99,59	99,08	98,80	98,12	0,00	192.497.400	201.454.782
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	300.000.000	0	1.031.470.000	1.314.529.000	0	296.044.725	0	1.026.642.517		0,00	98,68	0,00	99,53	0,00	529.199.800	330.671.811
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	300.000.000	0	1.031.470.000	1.314.529.000	0	296.044.725	0	1.026.642.517		0,00	98,68	0,00	99,53	0,00	529.199.800	330.671.811
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	300.000.000	0	1.031.470.000	1.314.529.000	0	296.044.725	0	1.026.642.517		0,00	98,68	0,00	99,53	0,00	529.199.800	330.671.811
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.072.543.000	977.000.000	1.162.054.000	1.400.726.000	958.164.000	2.299.138.755	927.662.901	1.153.019.916	1.391.228.384		74,83	94,95	99,22	99,32	0,00	1.514.097.400	1.442.762.489
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.022.543.000	877.000.000	1.118.500.000	1.278.454.000	862.274.000	2.278.944.605	828.816.510	1.109.864.013	1.270.313.684		75,40	94,51	99,23	99,36	0,00	1.431.754.200	1.371.984.703
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.022.543.000	877.000.000	1.118.500.000	1.278.454.000	862.274.000	2.278.944.605	828.816.510	1.109.864.013	1.270.313.684		75,40	94,51	99,23	99,36	0,00	1.431.754.200	1.371.984.703
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	45.000.000	75.000.000	55.500.000	94.540.000	94.540.000	19.166.662	71.970.826	54.894.322	93.523.250		42,59	95,96	98,91	98,92	0,00	72.916.000	59.888.765
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	972.000.000	17.261.000	137.000.000	119.274.000	170.094.000	288.758.282	17.259.525	136.045.608	119.092.591		29,71	99,99	99,30	99,85	0,00	283.125.800	140.289.002
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.430.398.000	100.000.000	96.000.000	94.640.000	87.640.000	1.412.085.386	98.076.260	93.748.215	94.064.343		98,72	98,08	97,65	99,39	0,00	361.735.600	424.493.551
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	575.145.000	684.739.000	830.000.000	970.000.000	510.000.000	558.934.275	641.509.899	825.175.868	963.633.500		97,18	93,69	99,42	99,34	0,00	713.976.800	747.313.386
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0	0	0	86.156.000	85.656.000	0	0	0	85.748.500		0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	34.362.400	21.437.125
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	86.156.000	85.656.000	0	0	0	85.748.500		0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	34.362.400	21.437.125
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	86.156.000	85.656.000	-	-	-	85.748.500		0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	34.362.400	21.437.125
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	50.000.000	100.000.000	43.554.000	36.116.000	10.234.000	20.194.150	98.846.391	43.155.903	35.166.200		40,39	98,85	99,09	97,37	0,00	47.980.800	49.340.661
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	100.000.000	43.554.000	36.116.000	10.234.000	20.194.150	98.846.391	43.155.903	35.166.200		40,39	98,85	99,09	97,37	0,00	47.980.800	49.340.661

Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINan)	80.000.000	100.000.000	43.854.000	34.114.000	10.234.000	20.194.150	98.844.371	43.155.903	35.144.200	40,37	98,85	99,09	97,37	0,00	47.980.800	49.340.441
--	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------	-------	-------	------	------------	------------



Kebumen, 31 Januari 2025  
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST.MT  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196701261986071001

Lampiran 3

1. Piagam Penghargaan kepada Pasar Sruni, Kabupaten Kebumen atas Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2024



2. Piagam Penghargaan kepada Industri Kecil dan Industri Menengah *One Village One Product* (OVOP) Tahun 2024 oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia



3. Piagam Penghargaan Pendataan Industri Kecil Tahun 2024 melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebesar 194% 97 dari 50 Industri Kecil

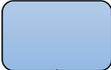
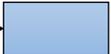
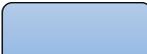


## SOP PENGUMPULAN DATA PENGUKURAN KINERJA

  <b>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN</b>	Nomor SOP	800 / 2166	
	Tanggal Pembuatan	18 Maret 2024	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	18 Maret 2024	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen   <b>HARYONO WAHYUDI, ST, MT</b> Pembina Utama Muda NIP. 197401261999031004	
NAMA SOP	Pengumpulan Data Pengukuran Kinerja		
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prodedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;		1. Mengetahui dan memahami aturan tentang peraturan perundang-undangan terkait; 2. Memahami sasaran dan capaian program; 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi, uraian tugas; 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya Renstra OPD.	

<p>7. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>KETERKAITAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Renstra;</li> <li>2. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);</li> <li>3. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan LAKIP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP;</li> <li>2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program;</li> <li>3. Alat tulis kantor;</li> <li>4. Komputer/Laptop yang dilengkapi printer.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PERINGATAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<p>Apabila Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala OPD: Lembar disposisi/Arahan; Tanda Tangan</li> <li>2. Sekretaris OPD: Lembar disposisi; Paraf</li> <li>3. Kasubbag Perencanaan: Lembar disposisi; Paraf</li> </ol> <p>Setiap tahap terdokumentasikan dengan baik, baik dalam bentuk <i>softcopy</i> maupun <i>hardcopy</i></p>

**FLOWCHART PENGUMPULAN DATA PENGUKURAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

No	KEGIATAN	PELAKSANA			Kelengkapan	MUTU BAKU		
		Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Bidang		Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan staff (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang					5 Menit	Dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang				Dokumen	10 Menit	Dokumen format data	
3	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing bidanag dan menyampaikan kepada Kasubbag Perencanaan melalui Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				Dokumen	270 Menit	Dokumen data isian	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang yang telah terkumpul				Dokumen	90 Menit	Rekap dokumen data isian	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja				Dokumen	90 Menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan	

## CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Persen	46,67	77,36	165,76
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	Persen	29,9	0,82	2,73
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	Persen	6	24,80	413,26
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	Persen	11,79	11,82	100,51
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	Unit usaha	45	275	611,11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	75	75
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	Rupiah	8,273	7,322	90,79
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	Persen	±1,5	-3,01	200,67
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	Rupiah	2.100	41.748	1988
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang Tertera	Persen	49,06	104,7	213,44
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	Persen	71,77	80,23	112
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	Persen	20,43	31,18	152,61
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	1	1	100

## TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Program	Indikator Kinerja	Target	Pagu
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	53,33	16.072.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	36,08%	63.369.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	44,38%	86.543.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	11,74%	77.250.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	50	1.716.020.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.008.330.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	7.722.334.000	10.566.364.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	1,5	106.804.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	2.200	70.520.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP yang Tertera	44,16	147.755.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	73,27	1.314.529.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	31,5	802.180.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	100	60.024.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	1	10.234.000